



## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 – 2023

Yohanes Frederik Gesi Kedang<sup>1\*</sup>, Andreas Rengga<sup>2</sup>, Konstantinus Patisanga<sup>3</sup>

Universitas Nusa Nipa, Indonesia<sup>1234</sup>

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Korespondensi Penulis: [gesifrederik0@gmail.com](mailto:gesifrederik0@gmail.com)

**Abstract.** :The research aim was to examine the regional financial performance of the Local Government of Sikka Regency. This research employed a descriptive quantitative method. The population of this study consisted of Budget Realization Reports (APBD) of the Local Government of Sikka Regency, with the sample covering five fiscal years from 2019 to 2023. Data were collected through documentation.

The financial performance of the Local Government of Sikka Regency, as measured by the independence ratio, was categorized as very low with an instructive relationship pattern, where the role of the central government was more dominant than the independence of the local government. The effectiveness of the regional financial performance of Sikka Regency in 2019 – 2023 had an average of 85,90%, which fell into the less effective category. The allocation of funds in Sikka Regency was still unbalanced, as most of the APBD was allocated to operational expenditures with an average of 68,48%, while capital expenditures accounted for only an average of 13,4%. The revenue growth of the Sikka Regency Government from 2019 to 2023 tended to fluctuate, which occurred due to the suboptimal revenue received by the local government

**Keywords :** Regional Financial Performance, Financial Ratio, APBD

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Sikka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini, yaitu Laporan Realisasi Anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Sikka dengan sampel yang digunakan yaitu selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2019 – 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi.

Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sikka jika dilihat dari rasio kemandirian termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. Efektivitas kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sikka di tahun 2019 – 2023 memiliki rata-rata 85,90% yang termasuk kedalam kategori kurang efektif. Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional dengan rata-rata sebesar 68,48% sedangkan untuk belanja modal hanya memiliki rata-rata 13,4%. Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka dari Tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah Kabupaten Sikka.

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, APBD

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu daerah agar dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik atau tidak.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu cara untuk menilai kinerja tersebut dengan menganalisis laporan keuangan (Dharmastuti dan Gousario, 2015).

Analisis rasio adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan dengan membandingkan data dari laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Pada penelitian, indikator kinerja keuangan yang digunakan adalah analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Sejarah singkat Kabupaten Sikka adalah dengan berlakunya undang - undang nomor 69 tahun 1958 (lembaran negara RI tahun 1958 nomor 122). Pada tahun 1967 daerah tingkat II Sikka di ganti namanya menjadi " Kabupaten Sikka" dengan kepala daerahnya Laurensius Say. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Februari 1962 Nomor pem.66/1/2 maka wilayah Kabupaten Sikka di bagi atas 5 buah kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Maumere, 2. Kecamatan Nita, 3. Kecamatan Talibura, 4. Kecamatan Kewapante, 5. Kecamatan Paga.

Berikut adalah ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka yang digunakan sebagai alat untuk pengukuran kinerja keuangan.

**Tabel 1.** Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Anggaran PAD	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah
2019	99.619.556.108,26	924.358.495.749,08	194.401.857.125,00	800.525.038.117,00	192.989.791.557,74	995.918.011.826,74
2020	119.601.046.361,49	791.494.640.670,00	108.613.927.900,59	749.680.471.396,00	93.001.041.920,77	906.023.956.510,77
2021	90.816.311.412,52	1.001.126.676.974,00	106.431.778.313,00	757.035.729.662,00	126.329.007.697,75	1.112.256.100.953,75
2022	96.656.644.905,07	952.943.640.966,53	105.724.221.360,00	819.955.992.040,00	191.918.116.670,00	1.218.737.416.032,00
2023	105.856.684.209,83	858.711.463.145,28	115.790.415.208,00	776.189.449.618,55	163.243.968.890,00	1.138.383.643.458,55

*Sumber data : BPKAD Kab. Sikka*

Capaian kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada 2020, namun menurun pada 2021 akibat dampak pandemi dan meningkat kembali pada 2023 sebesar Rp105,86 miliar. Pendapatan transfer juga menunjukkan ketidakstabilan, tertinggi

pada 2021 sebesar Rp1,001 triliun, namun mengalami penurunan menjadi Rp858,71 miliar pada 2023. Sementara itu, belanja daerah terus meningkat dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar Rp1,218 triliun, meskipun belanja modal masih lebih rendah dibanding belanja operasi, menandakan investasi infrastruktur yang masih terbatas. Namun, beberapa permasalahan masih dihadapi, seperti fluktuasi PAD yang menunjukkan ketergantungan pada faktor eksternal dan perlunya optimalisasi sumber pendapatan daerah, serta tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer yang dapat menjadi risiko bagi keberlanjutan fiskal daerah. Selain itu, efisiensi belanja daerah perlu ditingkatkan dengan alokasi yang lebih proporsional antara belanja operasi dan belanja modal, serta dampak pandemi yang masih mempengaruhi stabilitas pendapatan dan belanja daerah, sehingga pemulihan ekonomi harus terus didorong.

Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka adalah melakukan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 – 2023”**.

## **2.2. Kajian Teoritis**

### **Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu pencapaian oleh keuangan perusahaan pada waktu tertentu dan memberikan pandangan atas kondisi dari keuangan yang telah tercapai di waktu yang tertentu. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012: 2). Penilaian Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan perhitungan rasio keuangan. Nilai rasio keuangan tersebut yang nantinya dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ada, membandingkan nilai rasio keuangan yang diperoleh dari tahun ke tahun merupakan langkah guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah baik atau kurang baik (Parathon, 2012: 3).

Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah penilaian yang dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana kondisi perusahaan berada dengan menggunakan perbandingan dan aturan yang berlaku.(Tanor et al., 2015)

### **Tujuan Pengukuran Kinerja**

Setiap perusahaan atau lembaga harus mengukur kinerja keuangan perusahaannya. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan atau lembaga salah satunya adalah untuk melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan atau lembaga dan faktor yang menyebabkan kinerja keuangan perusahaan dan lembaga meningkat atau menurun.

Menurut Munawir (2015:31) pengukuran kinerja keuangan perusahaan atau lembaga mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

- 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan
- 2) Untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi, atau
- 3) Kemampuan perusahaan atau lembaga memenuhi kewajiban keuangan saat ditagih.
- 4) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan atau lembaga untuk memenuhi kewajiban keuntungannya apabila perusahaan atau lembaga tersebut dilikuiditaskan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang.
- 5) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas yaitu suatu kemampuan perusahaan atau lembaga menghasilkan laba pada periode tertentu.
- 6) Untuk mengetahui stabilitas usaha yaitu : kemampuan perusahaan atau lembaga untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertinggalkan kemampuan perusahaan atau lembaga untuk membayar beban bunga atas hutang – hutang tersebut tepat pada waktunya.

Sementara itu, menurut Rusmanto (2011: 621) dalam Ridhawati (2014) perkiraan kinerja keuangan berencana untuk:

- 1) Menyampaikan data yang berharga dalam pilihan penting tentang sumber daya untuk digunakan dan mendorong pimpinan untuk menetapkan pilihan yang melayani kepentingan perusahaan atau lembaga
- 2) Memperkirakan kinerja unit usaha sebagai elemen yang akan terjadi. Estimasi kinerja digunakan sebagai alasan untuk mensurvei kemungkinan perubahan aset keuangan yang mungkin dikendalikan di kemudian hari.

## **Rasio Keuangan Dalam Pengukuran Kinerja**

Menurut Hanafi dan Halim (2012:76), ada lima jenis rasio keuangan yang sering digunakan yaitu antara lain :

1. Rasio Likuiditas
2. Rasio Utang/Leverage/Solvabilitas
3. Rasio Aktiva
4. Rasio Profitabilitas
5. Rasio Nilai Pasar

Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk melangsungkan hidupnya, perusahaan atau lembaga harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sangat sulit bagi perusahaan atau lembaga untuk menarik modal dari luar. Investor akan menanamkan modal pada perusahaan atau lembaga yang mempunyai profit dan return yang tinggi, sehingga diharapkan akan memberikan keuntungan atas investasinya.

## **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya sehingga membutuhkan informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden karena dengan informasi pemegang saham dapat memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual bahkan membelinya. Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai

alat untuk memprediksi untuk kondisi di masa yang akan datang (*forecast analyzing*).

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka- angka dalam satuan moneter.

Dalam konteks hubungan laporan keuangan dan pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Informasi itu harus bermanfaat dan dipahami.
2. Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan.
3. Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya.
4. Informasinya harus memiliki sifat daya banding

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya PP No 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaknya-tidaknya meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Saldo Anggaran Lebih
- d. Neraca
- e. Laporan Arus Kas
- f. Ekuitas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Halim (2007 : 19) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, dimana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber- sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.(Labi, 2019)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Didasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga

struktur APBD-nya menjadi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Daerah
- 2) Belanja Daerah
- 3) Pembiayaan Daerah

### **3.3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sikka.

### **4.4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dahulu Kabupaten Sikka merupakan sebuah Onderafdeling dan kemudian menjadi Swapraja yang dipimpin oleh 12 raja dan ratu secara turun temurun. Yakni sejak pemerintahan Portugis saat dipimpin oleh Raja Don Alesu Ximenes da Silva hingga masa pemerintahan Belanda oleh Raja Andreas Djati da Silva pada tahun 1874. Saat kepemimpinan Raja J. Nong Meak da Silva pada tahun 1902 sistem pemerintahan Swapraja Sikka diubah dengan sistem Desentralisasi. Hingga kemudian berlakunya Undang - undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur maka pada tanggal 1 Maret 1958, daerah Swapraja Sikka dijadikan Daerah Tingkat II dengan ibu kotanya Maumere dengan kepala daerah pertama pada masa itu adalah D. P. C. Ximenes da Silva. Penyelenggaraan pemerintahannya di dasarkan atas Undang - undang nomor I tahun 1957 tentang pokok - pokok pemerintahan daerah. Pada tahun 1967 daerah tingkat II Swapraja Sikka di ganti namanya menjadi Kabupaten Sikka dengan kepala daerahnya Laurensius Say.

Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Sikka 7.553,24 Km<sup>2</sup> terdiri atas luas daratan (Pulau Flores) 1.614,80 km<sup>2</sup> dan pulau-pulau kecil sebanyak 18 buah 117,11 km<sup>2</sup> serta luas lautan 5.821,33 Km<sup>2</sup>. Luas daratan Kabupaten Sikka dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka hanya sebesar 3,66% dari luas wilayah NTT atau seluas 47.349,91 km<sup>2</sup>. Kabupaten Sikka terletak di antara 8°22'–8°50' Lintang Selatan dan 121°55'40"–122°41'30" Bujur Timur.

Keadaan topografi sebagian besar berbukit, bergunung, dan berlembah dengan lereng-lereng yang curam yang umumnya terletak di daerah pantai. Topografi dengan ketinggian 100-500

mdpl, yaitu seluas 48.171 ha atau sekitar 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan. Sementara itu, topografi dengan ketinggian 500–1000 m dpl, yaitu seluas 70.216 ha atau sekitar 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, yang merupakan daerah pegunungan. Selanjutnya, topografi dengan ketinggian lebih dari 1.000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau sekitar 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, yang merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi dan hanya terdapat di beberapa kecamatan saja.

## Hasil Penelitian

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2019-2023. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dalam APBD. Dari data tersebut akan dapat diketahui kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sikka. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah :

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah menanggung sendiri kegiatan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dan pembangunan dengan sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Dasar perhitungannya yaitu: (Ropa, 2016)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2023

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pempus /Prov & Jaminan (Rp)	RKKD (%)	Keterangan
----------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------	------------



2019	99.619.556.108,26	924.358.495.749,98	10,77%	Rendah Sekali
2020	119.601.046.361,49	791.494.640.670,00	15,11%	Rendah Sekali
2021	90.816.311.412,52	1.001.126.676.974,00	9,1%	Rendah Sekali
2022	96.656.644.905,07	952.943.640.966,53	10,1%	Rendah Sekali
2023	105.856.684.209,83	1.033.238.337.994,28	10,2%	Rendah Sekali
RATA-RATA			11,1%	Rendah Sekali

Sumber: Data diolah (2022)

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan :

- Pola hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- Pola hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Dilihat dari perhitungan diatas, maka untuk rasio kemandirian Kabupaten Sikka yang diukur dalam 5 tahun, dimana tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 10,77 %, yang termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% - 25% pada tahun 2020 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 15,11% dan tahun 2021 sebesar 9,1% yang juga termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% - 25%.

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka dilihat dari rasio kemandirian diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat belum mampu mandiri secara otonomi.

## 2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Efektivitas Pemerintah Daerah untuk merealisasikan PAD dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

Tahun Anggaran	Target Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	RE (%)	Keterangan
2019	194.401.857.125,00	99.619.556.108,26	51,24	Tidak Efektif
2020	108.613.927.900,59	119.601.046.361,49	110,11	Sangat Efektif
2021	106.431.778.313,00	90.816.311.412,52	85,33	Kurang Efektif
2022	105.724.221.360,00	96.656.644.905,07	91,42	Efektif
2023	115.790.415.208,00	105.856.684.209,83	91,42	Efektif
	RATA-RATA		85,90	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa Anggaran PAD Pemerintah Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, target penerimaan PAD sebesar Rp 194.401.857.125,00 berada pada tingkat efektivitas sebesar 51,24% dan tergolong dalam kategori tidak efektif. Pada tahun 2020, target penerimaan PAD sebesar Rp 108.613.927.900,59, berada pada tingkat efektivitas sebesar 110,11% dan tergolong dalam kategori sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari target penerimaan PAD sebesar Rp 106.431.778.313,00 yang memiliki tingkat efektivitas sebesar 85,33% dan tergolong dalam kategori kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan rasio efektifitas sebesar 91,42% yang tergolong dalam kategori efektif.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya target realisasi pendapatan asli daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan juga cenderung mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami peningkatan pada Pemerintah Kabupaten Sikka

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka cukup efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas menunjukkan 51% - 110% yang termasuk kriteria cukup efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.

Adapun faktor yang menyebabkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka cukup

efektif dilihat dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Kabupaten Sikka dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dari data yang dimiliki ternyata upaya untuk menghasilkan pendapatan cukup sesuai target. Hal ini disebabkan belum maksimalnya penerimaan yang dihasilkan dari pendapatan dan belanja.

### 3. Rasio Aktifitas (Rasio Keserasian)

Pemerintah daerah mengutamakan alokasi dananya pada belanja pembangunan dan belanja rutin secara maksimal. Untuk mengetahui rasio keserasian itu yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$$

Tabel 4.4 Rasio Aktivitas Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2023

Tahun	APBD	Belanja		Rasio Aktivitas	
		Operasi	Modal	Operasi (%)	Modal (%)
2019	1.239.194.874.138,26	800.525.038.117,00	192.989.791.557,74	64,60	15,57
2020	1.102.491.657.749,49	749.680.471.396,00	93.001.041.920,77	68,00	8,43
2021	1.122.667.568.385,52	757.035.729.662,00	126.329.007.697,75	67,43	11,25
2022	1.091.876.321.999,69	819.955.992.040,00	191.918.116.670,00	75,09	17,60
2023	1.153.597.977.042,11	776.189.449.618,55	163.243.988.890,00	67,30	14,15
Rata-Rata				68,48	13,4

Sumber: Data diolah, (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, rasio aktivitas belanja Kabupaten Sikka pada komponen belanja operasi berada pada tingkat rata-rata 68,48%. Sementara pada komponen belanja modal berada pada tingkat rata-rata 13,4%. Angka ini menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi dari rasio belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka lebih memprioritaskan alokasi dana yang lebih besar pada belanja operasi, tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya porsi alokasi belanja modal dimana dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat maupun layanan publik.

### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah diperoleh dari 1 periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan dan pengeluaran. Diformulasikan sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Realisasi } X_n - \text{Realisasi } X_{n-1}}{\text{Realisasi } X_{n-1}}$$

Tabel 4.5 Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Xn	Realisasi Xn-1	Realisasi Xn- (Xn-1)	r (%)	Keterangan
2019	99.619.556.108,26	100.868.194.502,01	1.248.638.393,75	-,123	Rendah
2020	119.601.046.361,49	99.619.556.108,26	19.981.490.253,23	20,05	Rendah
2021	90.816.311.412,52	119.601.046.361,49	28.784.734.948,97	-24,06	Rendah
2022	96.656.644.905,07	90.816.311.412,52	5.840.333.492,55	6,43	Rendah
2023	105.856.684.209,83	96.656.644.905,07	9.200.039.304,76	9,51	Rendah
RATA-RATA				2,36	Rendah

Sumber : Data diolah, (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada table 4.5 diatas, bahwa pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Sikka yang diukur dalam 5 tahun dimana pada tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2019 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -1,23%, tahun 2020 sebesar 20,05% untuk tahun 2021 sebesar -24,06% untuk tahun 2022 sebesar 6,43% dan untuk tahun 2023 sebesar 9,51%.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2019-2023 merupakan pertumbuhan fluktuatif karena tidak dapat dinyatakan mengalami ketetapan baik dalam peningkatan maupun penurunan rasio dalam periode 5 tahunnya, hal ini terjadi dikarenakan tidak tetapnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sikka, perlu adanya optimalisasi sektor PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Dimana sektor terbesar penyumbang PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Inilah yang perlu diamati secara keseluruhan agar terciptanya pertumbuhan yang stabil atau meningkat setiap tahunnya.

## **PEMBAHASAN**

Kinerja keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah di tahun 2019-2023 rata-rata 11,06% yang termasuk kedalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Rasio Kemandirian yang sedang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah sangat tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Jadi kemandirian Pemerintah Kabupaten Sikka secara keseluruhan dapat dikatakan rendah sekali. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten masih sangat tergantung terhadap sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sikka belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiaya pembangunan daerahnya.

Menurut penelitian Anim Rahmayati (2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011- 2013”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa rasio kemandirian kota Sukoharjo bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi. Kemampuan keuangan kabupaten Sukoharjo masih sangat rendah dan pola hubungannya instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sikka jika dilihat dari rasio efektifitas ditahun 2019 - 2023 rata-rata 85,90% yang termasuk kedalam kategori kurang efektif karena masih berada dibawah 100% yaitu diantara 75-89% yang menggambarkan pemerintah daerah kurang efektif dalam mengoptimalkan pencapaian target-targetnya dengan potensi riil yang sudah ditetapkan.

Rasio efektifitas yang kurang efektif menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sikka, berbagai kemungkinan kurang efektifnya Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan target pendapatan daerah salah satunya tingginya beban atau biaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sikka dikatakan kurang efektif dikarenakan kurangnya ketelitian dalam menentukan atau menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara riil sesuai dengan aturan yang berlaku dan kedisiplinan aparatur daerah juga sangat dibutuhkan dalam merealisasi target pendapatan asli daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.

Menurut penelitian terdahulu Rindang Arumdari (2019) yang berjudul “Analisis Rasio keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan” bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Medan dikatakan kurang efektif.

Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sikka jika dilihat dari rasio aktivitas ditahun 2019 – 2023 untuk komponen belanja operasi berada pada tingkat rata-rata 68,48%. Sementara pada komponen belanja modal memiliki rata-rata sebesar 13,4%. Angka ini menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi dari rasio belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka lebih memprioritaskan alokasi dana yang lebih besar pada belanja operasi, tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya porsi alokasi belanja modal dimana dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat maupun layanan publik. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relative besar. Oleh karena itu, rasio aktivitas belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Menurut penelitian terdahulu Arfan Prasetya (2019) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Pemerintah daerah Di Era Transparansi di Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio aktivitas yang diperoleh dalam kategori baik. Pengeluaran belanja operasi berada pada kisaran lebih besar dari pada belanja modal karena besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Sehingga kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gowa sudah mengalami kemajuan dan memperhatikan pembangunan.

Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sikka jika dilihat dari rasio pertumbuhan ditahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi tiap tahunnya, artinya pendapatan daerah yang terjadi pada Kabupaten Sikka yaitu pertumbuhan yang relatif atau tidak konstan baik dalam kenaikan maupun penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan jumlah pendapatan di tiap tahunnya. Perlu adanya optimalisasi sektor PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Dimana sektor terbesar penyumbang PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Inilah yang perlu diamati secara keseluruhan agar terciptanya pertumbuhan yang stabil atau meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak luput dari proses kerjasama yang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Menurut penelitian terdahulu menurut Arfan Prasetya (2019) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Pemerintah daerah di era transparansi di Kabupaten Gowa”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dari periode yang satu ke periode berikutnya. Sedangkan menurut Diana Polince Swabra (2018) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012-2016”. Menunjukkan masing-masing komponen penyusun APBD mengalami fluktuasi, PAD, total pendapatan daerah dan belanja operasi mengalami pertumbuhan positif sedangkan belanja modal mengalami pertumbuhan negatif.

## **5.5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan penelitian yang diukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sikka jika dilihat dari rasio kemandirian termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Efektivitas kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sikka di tahun 2019 – 2023 memiliki rata-rata 85,90% yang termasuk kedalam kategori kurang efektif karena masih berada dibawah 100% yaitu diantara 75- 89% yang menggambarkan pemerintah daerah kurang efektif dalam mengoptimalkan pencapaian target-targetnya dengan potensi riil yang sudah ditetapkan.
3. Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional dengan rata-rata sebesar 68,48% sedangkan untuk belanja modal hanya memiliki rata-rata 13,4%.

Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka dari Tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah Kabupaten Sikka.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sikka lebih mengoptimalkan pencapaian target-targetnya agar efektivitas kinerja keuangan daerah dapat berjalan efektif. Dan juga sebaiknya realisasi PAD sebisa mungkin untuk dapat ditingkatkan tiap tahunnya.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sikka lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **REFERENSI**

- Arumdari, R. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Biduri, S. (2018). Buku Ajar: Akuntansi Sektor Publik.
- Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Alfabeta. Bandung.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- Hidayat Wahyu, W. (2018). *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Maisyuri, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Visioner & Strategis*, 6(1).
- Oktavia, M. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).
- Ruslana, N., Rustandi, A., & Komarlina, D. H. L. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. *WELFARE*, 1(2), 139-149.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43-59.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7, 81-92.



Swabra, D. P. (2018). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2012-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Prasetya, A. (2019). Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah di Era Transparansi di Kabupaten Gowa.